



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI SULAWESI UTARA**

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI SULAWESI UTARA
10-14 APRIL 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - A. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - B. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 Januari 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 Maret 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara;

2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

D. SUSUNAN TIM

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Pimpinan Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 10-14 April 2021 dan bertempat di Kota Manado dan Kota Bitung.

F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

1. Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) di Manado;
2. Gudang Bulog, Madidir Ure, Madidir, Kota Bitung;
3. Kantor Karantina Pertanian Wilker Pelabuhan Bitung; dan
4. Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung.

II. GAMBARAN UMUM

Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur,

Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020 berjumlah 2.621.923 jiwa, dan luas wilayahnya adalah 13.892,47 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 2.270.596 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28 persen/tahun. Hampir 45% penduduk tinggal di perkotaan, dan sisanya sebesar 55% tinggal di pedesaan. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah dasar lumayan tinggi sebesar 96,10% sehingga penduduk yg tidak menikmati bangku sekolah dasar hanya kurang dari 5%.

Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 diantaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa/kelurahan. Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona, yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan.

Zona ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km² dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 km dan luas hutan mencapai 701. 885 hektare. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi. Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi atau tepatnya 0°LU – 3°LU dan 123°BT – 126°BT serta merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Sulawesi Utara terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 - 1.995 dpl.

Kondisi geologi sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda, sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut gunung merapi aktif yang padam menghiasi Minahasa bagian tengah, daerah Bolaang Mongondow, dan Kepulauan Sangihe. Material-material yang dihasilkan letusannya berbentuk padat serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua vulkanik ini berbentuk pegunungan (otogenisa) menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief topografik yang cukup besar. Sulawesi Utara terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif yaitu:

- Kabupaten Bolang Mongondow:

- 1. Gunung Ambang dengan ketinggian 1.689 dpl.
- Kabupaten Minahasa Selatan:
 - 1. Gunung Soputan dengan ketinggian 1.783 dpl.
- Kota Tomohon:
 - 1. Gunung Lokon dengan ketinggian 1.579,6 dpl; dan
 - 2. Gunung Mahawu dengan ketinggian 1.331,0 m yang merupakan hulu dari 12 sungai besar dengan 7 danau.
- Kepulauan Sangihe:
 - 1. Karangetang dengan ketinggian 1.320,0 dpl;
 - 2. Ruang dengan ketinggian 714,0 dpl;
 - 3. Banuawuhu;
 - 4. Submarin; dan
 - 5. Gunung Awu.
- Kota Bitung:
 - 1. Gunung Tangkoko dengan ketinggian 1.149,0 dpl.

Gambaran Umum Kota Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Banyak penduduk Kota Bitung yang berasal dari Suku Sangir, sehingga kebudayaan yang ada di Bitung tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara tersebut. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan.

Kota Bitung terletak pada posisi geografis diantara 1° 23' 23" - 1° 35' 39" LU dan 125° 1' 43" -1 25° 18' 13" BT dan luas wilayah daratan 304 km².

Batas wilayah Kota Bitung adalah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Minahasa Utara
Timur	Laut Maluku

Selatan	Laut Maluku
Barat	Kabupaten Minahasa Utara

Dari aspek topografis, sebagian besar daratan Kota Bitung berombak berbukit 45,06%, bergunung 32,73%, daratan landai 4,18%, dan berombak 18,03%. Di bagian timur mulai dari pesisir pantai Aertembaga sampai dengan Tanjung Merah di bagian barat, merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0-150, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan, dan jasa. Di bagian utara keadaan topografi semakin bergelombang dan berbukit-bukit yang merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman margasatwa dan cagar alam. Di bagian selatan terdapat Pulau Lembeh yang keadaan tanahnya pada umumnya kasar ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura, dan palawija. Disamping itu memiliki pesisir pantai yang indah sebagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata bahari.

Perekonomian Kota Bitung didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Namun dalam perkembangannya sektor industri ternyata berkembang cukup pesat dan mencapai nilai tertinggi. Bertumbuhnya sektor industri sangat membantu perekonomian terutama dengan meluasnya kesempatan kerja. Bertambahnya perusahaan industri juga meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama dengan terserapnya tenaga kerja sebanyak 21.755 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang daya serapnya mencapai 21.290 tenaga kerja. Begitu juga dari sisi kapital dimana peningkatan jumlah perusahaan ini diikuti pula dengan peningkatan nilai investasi menjadi 541,67 miliar rupiah atau meningkat 23,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2004 sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian di Kota Bitung. Industri di Kota Bitung didominasi oleh industri perikanan, galangan kapal, dan industri minyak kelapa. Disamping itu juga ada industri transportasi laut, makanan, baja, industri menengah, dan kecil.

Gambaran Umum Kota Manado

Kota Manado atau Menado adalah ibu kota dari P Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak

di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790 jiwa dan bertambah menjadi 475.557 jiwa pada tahun 2020, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020. Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU. Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24° - 27 °C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ±84 %. Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektare.

Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di gunung Tumpa. Wilayah perairan Kota Manado meliputi pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter. Sedangkan pulau Manado Tua adalah pulau gunung dengan ketinggian ± 750 meter. Sementara itu perairan Teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2.000 meter pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Kedalaman ini menjadi semacam penghalang sehingga sampai saat ini intensitas kerusakan Taman Nasional Bunaken relatif rendah. Jarak dari Manado ke Tondano adalah 28 km, ke Bitung 45 km, dan ke Amurang 58 km. Batas wilayah Kota Manado adalah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Minahasa Utara dan Selat Mantehage
Timur	Kabupaten Minahasa
Selatan	Kabupaten Minahasa
Barat	Teluk Manado

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tanggal 27 September 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kota Manado dan PERDA Nomor 5 Tanggal 27 September 2000 tentang Pemekaran

Kecamatan dan Kelurahan, wilayah Kota Manado yang semula terdiri atas 5 kecamatan dengan 68 kelurahan/desa dimekarkan menjadi 9 kecamatan dengan 87 kelurahan. Berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 Kota Manado dimekarkan kembali menjadi 11 kecamatan dengan 87 kelurahan. Tabel di bawah ini adalah daftar kecamatan beserta luas dan jumlah kelurahannya, yaitu:

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah kelurahan
1.	Bunaken	36,19	5
2.	Bunaken Kepulauan	16,85	4
3.	Malalayang	17,12	9
4.	Paal Dua	8,02	7
5.	Mapanget	49,75	10
6.	Sario	1,75	7
7.	Singkil	4,68	9
8.	Tikala	7,10	5
9.	Tuminting	4,31	10
10.	Wanea	7,85	9
11.	Wenang	3,64	12

Sebagian besar penduduk Kota Manado bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, atau pegawai swasta (41,44%), sebagai wiraswasta (20,57%), pedagang (12,85%), petani/peternak/nelayan (9,17%), buruh (8,96%). Sisanya bergerak di sektor jasa dan lain-lain (7%). Angka Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kota Manado tahun 2000 adalah Rp2,14 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka tahun 1994 yang berjumlah Rp703,87 miliar. Tingkat pertumbuhan yang dicapai dalam kurun waktu tersebut rata-rata 6,11% per tahun. Pada tahun 1994 sampai 1996 angka pertumbuhan berada di atas 10% kemudian melambat menjadi 2,92% pada tahun 1997 dan 0,32% pada tahun 1998 di mana merupakan angka terendah. Pada tahun 1999, pertumbuhan meningkat lagi menjadi 1,60% dan pada tahun 2000 menjadi 5,62%. Sejak munculnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997, perekonomian Kota Manado sangat terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka pengangguran yang diperkirakan pada tahun 2000 masih

sebesar 20.465 orang atau 13.67% dan meningkatnya jumlah keluarga miskin sebanyak 19.754 Kepala Keluarga (KK) atau 24,60%. Pada tahun 1999, terdapat indikasi adanya pemulihan perekonomian kota yang signifikan. Pendapatan perkapita Kota Manado naik dari Rp1.753.482,00 pada tahun 1994 menjadi Rp4.452.672,00 pada tahun 2000.

Perekonomian Kota Manado khususnya terdiri dari sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa. Pada tahun 1996 peran ketiga sektor utama ini dalam pembentukan PDRB adalah sejumlah 68,74%. Dalam kurun waktu 5 tahun, peran ketiga sektor ini cenderung semakin dominan yang dilihat dari kontribusinya pada tahun 2000 yang meningkat menjadi 74,68%. Laju inflasi Kota Manado selama kurun waktu dua tahun terakhir (2000-2001) sangat berfluktuatif. Pada tahun 2000 sempat mengalami deflasi sebanyak lima kali yaitu masing-masing pada bulan Januari sebesar -0,25%, April -0,08%, Mei -0,13%, Agustus -0,85%, dan Desember -0,16%. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 4,05%. Sehingga secara kumulatif inflasi yang terjadi di Manado sebesar 11,41%. Pada tahun 2001 terjadi deflasi sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Februari sebesar -0,56%, Agustus -0,23% dan Desember sebesar -0,26%. Sedangkan inflasi tertinggi pada tahun 2001 terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 2.83% di mana secara kumulatif inflasi pada tahun 2001 mencapai 13,30%.

III. HASIL KUNJUNGAN

A. Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma)

Balai Penelitian Tanaman Palma didirikan sejak jaman kolonial Belanda pada tahun 1930 dengan nama *Klapper Proofstation* yang berkantor di Sario Manado. Sejak berdiri telah beberapa kali berubah nama. Diawali dengan nama Lembaga Penelitian Tanaman Industri disingkat LPTI, kemudian menjadi Balai Penelitian Tanaman Industri atau BALITRI. Sejak tahun 1984, lebih fokus menangani tanaman kelapa, dengan nama Balai Penelitian Kelapa atau BALITKA. Selanjutnya tahun 1994 komoditas yang ditangani diperluas meliputi kelapa, sagu, aren, pinang, lontar, dan gewang, sehingga namanya menjadi Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain. Tahun 2011 mandat BALITKA

ditambah dengan komoditas Sawit dan Nipah, kemudian berubah nama menjadi Balai Penelitian Tanaman Palma yang populer dengan sebutan BALIT PALMA. Pada tahun 2020, mandat BALIT PALMA ditambah dengan komoditas kurma.

Balit Palma, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. Tugas pokok melaksanakan penelitian tanaman kelapa, sawit, sagu, aren, pinang, lontar, gewang, nipah, dan kurma. Fungsinya, melaksanakan penelitian di bidang genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman palma, juga memberikan pelayanan teknik kegiatan penelitian, kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman palma.

Balit Palma memiliki visi, menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi tanaman palma, untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani. Misinya, menghasilkan inovasi teknologi unggulan kelapa, sawit, aren, sagu, pinang, lontar, gewang, nipah, dan kurma. Untuk mewujudkan visi dan misi, Kepala Balai dibantu oleh tiga pejabat administrator, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknik, dan Kepala Seksi Jasa Penelitian. Dalam melaksanakan fungsi penelitian, didukung oleh tiga Kelompok Peneliti, yaitu Kelompok Peneliti Plasma Nutfah, Pemuliaan dan Perbenihan, Kelompok Peneliti Ekofisiologi, dan Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi. SDM Balit Palma terdiri atas 30 peneliti, 10 teknisi, 45 orang staf administrasi dan 37 tenaga kontrak.

Untuk mendukung kinerja, Balit Palma memiliki sarana penelitian yang terdiri dari lima laboratorium, yaitu laboratorium pemuliaan, plasma nutfah dan perbenihan, laboratorium molekular dan bioteknologi, laboratorium hama dan penyakit, laboratorium pengolahan hasil, serta laboratorium ekofisiologi yang telah terakreditasi ISO 17025: 2017. Sarana lainnya berupa kebun percobaan seluas 175 hektar yang tersebar di empat kebun percobaan, yaitu Kebun Percobaan Mapanget, Kima Atas, Paniki, dan Kayuwatu. Juga dilengkapi sarana bengkel rekayasa dan unit perpustakaan. Kebun percobaan, berisi

koleksi plasma nutfah tanaman palma yang digunakan sebagai materi penelitian, sumber benih, dan lokasi eduwisata.

Selain melaksanakan penelitian, Balit Palma juga melayani kerja sama penelitian dan magang. Kegiatan magang meliputi pelatihan bidang perbenihan, budi daya tanaman kelapa dan palma lain, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, dan pengolahan kelapa terpadu. Melalui eksplorasi dan identifikasi plasma nutfah di berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, telah diperoleh sejumlah aksesori tanaman palma yang dikoleksi di kebun-kebun percobaan Balit Palma. Sebagian telah dimanfaatkan dan dirilis sebagai varietas unggul tanaman palma. Sampai tahun 2019, Balit Palma telah melepas 23 varietas kelapa Dalam, 10 varietas kelapa Genjah, satu varietas kelapa Semi Toll, dan enam varietas kelapa Hibrida.

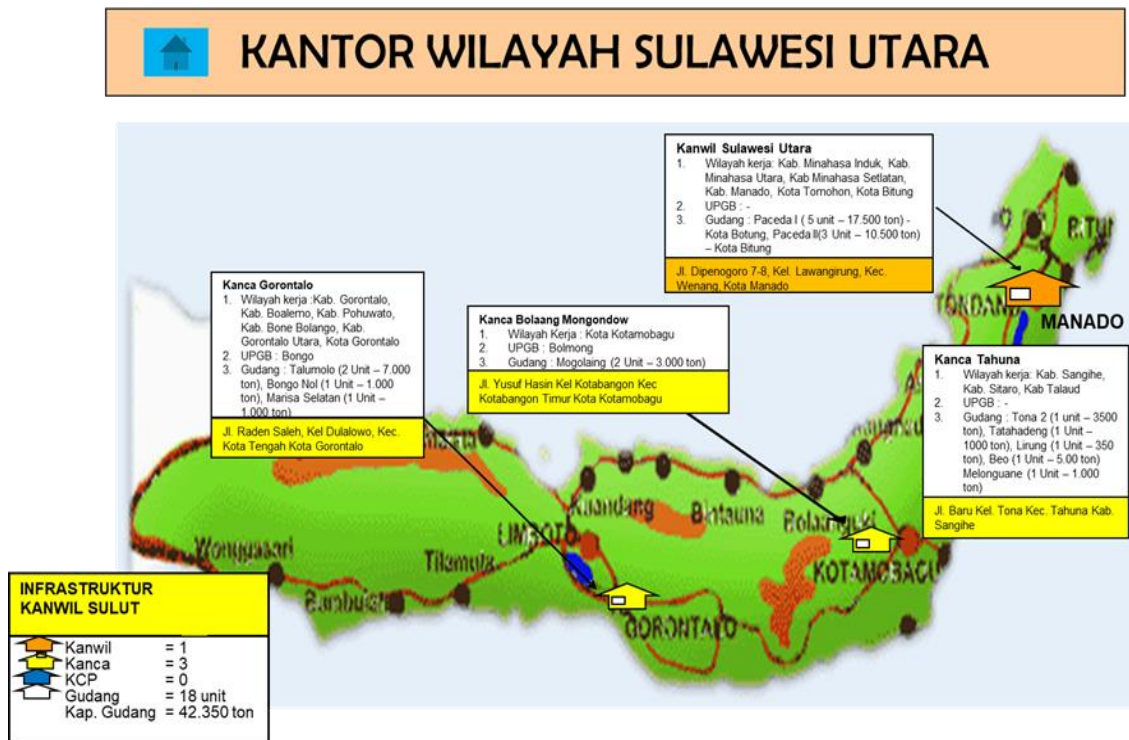
Di antara kelapa unggul yang dirilis, Kelapa Dalam Mapanget dengan potensi produksi tinggi dan kandungan minyak tinggi, merupakan salah satu varietas yang telah menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Varietas kelapa unggul baru yang sedang dikembangkan yaitu Kelapa Dalam Bido dari Kepulauan Morotai dan kelapa Genjah Entog asal Kebumen yang memiliki sifat cepat berbuah, pertambahan tinggi lambat dan ukuran buah besar. Selain kelapa unggul dengan pemanfaatan untuk produksi minyak, santan dan nira, terdapat beberapa varietas kelapa eksotik dengan karakter spesifik dan memiliki nilai jual tinggi yaitu kelapa Kopyor, kelapa Pandan Wangi, dan kelapa Cungap Merah. Juga telah dirilis varietas unggul tanaman palma meliputi aren Genjah Kutim dari Kalimantan Timur, Aren Dalam Toumuung dari Kota Tomohon, Aren Dalam Parasi dari Banten dan Aren Smulen ST-1 dari Bengkulu, Pinang Betara dari Jambi, dan Pinang Emas dari Kotamobagu. Varietas unggul sagu yang telah dilepas, yaitu Sagu Bestari dan Sagu Selat Panjang Meranti asal Riau dan Sagu Baruq di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Selain itu telah dihasilkan juga berbagai inovasi teknologi pendukung meliputi: jarak dan sistim tanam baru kelapa dan palma lainnya; teknologi baru pemupukan dan pengairan tanaman palma; paket teknologi pengendalian secara terpadu hama utama *Oryctes*, *Sexava*, dan *Brontispa*; pengendalian penyakit

busuk pucuk dan gugur buah kelapa; teknologi kultur embryo kelapa kopyor; teknologi pengolahan buah kelapa menjadi kopra putih dan arang skala petani mandiri, VCO, minyak goreng sehat, *nata de coco*, es krim VCO, yogurt kelapa, serta produk kosmetik seperti *baby oil*, *body butter*, *hair and body lotion*, sabun batang, dan pomade. Hasil ikutan ampas kelapa diolah menjadi biscuit, roti, dan stik kelapa. Pemanfaatan *nata de coco* menjadi *edible film*. Pengolahan nira menjadi gula cetak, gula cair, dan gula kristal. Pengolahan produk pangan fungsional berbahan pati sagu seperti biskuit, roti, papeda instan, beras analog, dan *edible film* sebagai bahan kemasan. Rekayasa alat pengolahan hasil meliputi alat penyerat sabut kelapa, pamarut daging kelapa sistem silinder, pengepres santan sistem hidrolik, alat pengolah sagu mekanis sistem terpadu serta alat pengolahan bioetanol teknis.

Sebagian besar inovasi teknologi yang dihasilkan Balit Palma telah dimanfaatkan oleh para stakeholder. Focus penelitian ke depan meliputi percepatan perakitan varietas unggul tipe baru, dilanjutkan dengan perbanyakan massal tanaman palma, menghasilkan teknologi budi daya tanaman palma yang efisien dan berkelanjutan, pengendalian hama dan penyakit terpadu yang ramah lingkungan serta pengolahan produk pangan fungsional, bioenergi, dan biomaterial. Beberapa aspirasi yang diterima oleh tim Komisi IV DPR RI adalah, permintaan dukungan peningkatan kapasitas dan jumlah SDM serta anggaran untuk sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu/kualitas tanaman palma nasional, khususnya kelapa. Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk memberikan dukungan selama hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani.

B. Gudang Bulog, Madidir Ure, Madidir, Kota Bitung



Pada kunjungan kali ini, Komisi IV DPR RI selain melihat kesiapan Bulog dalam menjaga ketersediaan beras dan melihat sarana gudang, juga dilakukan pertemuan dan diskusi dengan pihak Bulog dengan menghadirkan mitra terkait lainnya. Hal yang menjadi bahan diskusi adalah, Bulog mendapatkan tugas untuk menyerap beras petani namun tidak diberikan tugas untuk melepaskan beras. Sehingga kapasitas gudang Bulog menjadi penuh, dikhawatirkan ketika memasuki musim panen, Bulog tidak mampu menyerap beras petani. Untuk itu, Bulog berharap untuk diberikan tugas melepaskan beras dan diberikan penugasan untuk BPNT. Selain itu juga berharap agar fungsi Perum Bulog dikembalikan dimana Bulog sebagai operator dan penugasan hanya berasal dari satu pihak saja. Diketahui bahwa secara nasional cadangan beras Bulog cukup hingga bulan Juli. Adapun realisasi pengadaan di kantor wilayah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

(dalam ton)

NO	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG	2020			2021		
		TARGET	REALISASI	% REAL vs TARGET	TARGET	REALISASI *)	% REAL vs TARGET
1	KANWIL SULUT MANADO	1.520	1.945	127,94%	1.847	112	6,04%
2	KANCAB GORONTALO	1.900	165	8,70%	1.685	31	1,84%
3	KANCAB TAHUNA	950	620	65,26%	1.386	140	10,10%
4	KANCAB BOLAANG MONGONDOW	1.330	719	54,08%	1.082	25	2,31%
TOTAL		5.700	3.449	60,51%	6.000	308	5,13%

Sementara, data mengenai posisi persediaan beras CBP Kantor Wilayah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Satuan: ton

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Kanwil Sulut	2.973	79	3.052
2	Kancab Gorontalo	1.944	6	1.949
3	Kancab Tahuna	1.102	39	1.141
4	Kancab Bolaang Mongondow	759	12	771
JUMLAH		6.778	136	6.914

*) per 6 April 2021 (closing)

Komisi IV DPR RI menyampaikan agar Perum Bulog harus mengantisipasi lonjakan harga pangan pokok, mengingat dalam waktu dekat akan menghadapi bulan puasa dan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Dalam pertemuan juga disampaikan kembali, bahwa Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk melibatkan Perum Bulog dalam setiap kegiatan sosial/bansos, salah satu tujuannya agar terjadi perputaran beras Bulog. Sehingga Perum Bulog tidak hanya menyerap beras dalam negeri, namun juga menyalurkan beras. Berikut kinerja penyaluran BPNT Tahun 2021 di wilayah Sulawesi Utara:

NO	KANWIL	KOMODITI	PENJUALAN BPNT 01 JAN SD 06 APR 2021	
			Melalui RPK, E-Warong dan Agen	
			Kg	Rp
1	SULAWESI UTARA	BERAS	166,856	1,765,516,000
		TELUR	-	-

Sumber data : aplikasi penjualan langsung dan SIL

Selain itu tim Komisi IV DPR RI juga mendorong agar tahun 2022 dianggarkan untuk belanja barang berupa mesin pengolah tepung beras serta mendorong agar Perum Bulog disamping menyerap beras, juga melakukan penyerapan jagung.

C. Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado, Wilayah Kerja Bitung

Pada saat pertemuan disampaikan beberapa capaian dan kinerja operasional Balai Karantina Pertanian Manado (BKP Manado). BKP Manado memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan penularan HPHK, HPTK, dan OPTK yang terbawa oleh Media Pembawa. Selain itu, juga memiliki tugas dan fungsi tambahan, yaitu mendukung ekspor dengan menjamin komoditas pertanian ekspor tidak mengandung cemaran/kontaminan sehingga dapat diterima oleh negara lain. Terlebih lagi BKP wilayah kerja Bitung yang merupakan pelabuhan laut yang menjadi pintu masuk dan keluar serta penghubung bagi wilayah lain. Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain mengenai anggaran, SDM, dan sarana prasarana. Sebagai gambaran, anggaran tahun 2021 sebesar Rp10.937.994.000,00 dengan dukungan SDM sebanyak 58 PNS dan 30 PPNPNS, yang terdiri dari dokter hewan: 9, analis POPT: 11, paramedik d3: 12, pemeriksa POPT: 14, dan fungsional umum: 8. Hal ini dinilai masih belum memadai, mengingat luasnya wilayah kerja dan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh BKP Sulut. Komisi IV DPR RI juga menyampaikan bahwa status (eselon) kepegawaian SDM di BKP Manado seharusnya ditingkatkan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi dengan seluruh pihak terkait sehingga kinerja BKP Manado meningkat dan melakukan kegiatan operasional dengan baik.

Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan kinerjanya, antara lain kemudahan layanan publik, pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian guna mendorong ekspor pertanian Sulut, memfasilitasi konsultasi persyaratan ekspor dan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian, melalui layanan dan pendampingan bagi calon eksportir terkait syarat dan protocol karantina di negara tujuan ekspor serta bimtek maupun pelatihan protocol karantina negara tujuan.

Selain itu, perlu didorong penguatan perkarantinaan di perbatasan dan penguatan fungsi karantina di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Terkait hal ini, tim Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi bahwa Kantor Karantina di Melonguane masih status sewa. Berdasarkan beberapa hal tersebut, harus didorong peningkatan dan pengembangan sarana pendukung karantina di perbatasan (instalasi karantina, mini laboratorium, kendaraan operasional, penambahan incenerator) terutama di Bitung, mengingat jauhnya jarak dengan Manado serta perlunya fasilitas instalasi karantina hewan yang representatif, mengingat banyaknya penahanan hewan hidup di BKP Manado.

D. Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung

Pembangunan perikanan tangkap di PPS Bitung tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Pembangunan perikanan tangkap di PPS Bitung memiliki 2 sasaran strategis utama yakni: 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; dan 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Terkait realisasi volume produksinya selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,06% per tahun. Pada tahun 2015 tercatat volume produksi perikanan tangkap di PPS Bitung sebesar 45.208,52 ton dan meningkat pada tahun 2019. Selanjutnya untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan akibat kenaikan pendapatan nelayan, dimana Indeks harga yang diterima nelayan (IT) mengalami kenaikan sebesar 3,14%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga ikan mengalami peningkatan akibat perbaikan kualitas ikan yang diperjualbelikan. Sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) juga mengalami peningkatan sebesar 2,72%, dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,22%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh nelayan lebih kecil dibandingkan biaya yang diterima oleh nelayan.

Selanjutnya pada realisasi nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung periode tahun 2015-2019 juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,60% pertahun. Nilai produksi tahun 2015 sebesar Rp809.615.486.906,00 menjadi

sebesar Rp1.197.170.741.001,00 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan naiknya produksi perikanan tangkap dan naiknya harga ikan. Terutama jenis ikan tuna mempunyai kenaikan produksi rata-rata 17,36% per tahun dan merupakan bahan baku utama untuk produk ekspor sehingga mempunyai harga yang kompetitif.

Jenis pelayanan yang ada di PPS Bitung, antara lain:

No	Jenis Pelayanan
1.	Surat Tanda Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) Perikanan;
2.	Surat Tanda Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK) Perikanan;
3.	Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
4.	Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
5.	Penerbitan Sertifikat CPIB;
6.	Pelayanan Tambat Labuh;
7.	Pelayanan Penjualan Air;
8.	Pelayanan Penggunaan Tanah dibawah 500 M ² dan bangunan dibawah 250 M ² ;
9.	Pelayanan jasa Listrik;
10.	Pelayanan Jasa Sewa Alat Berat;
11.	Pelayanan Pas Masuk Harian;
12.	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan
13.	Pelayanan Jasa TPI Higienis

Negara tujuan ekspor produk perikanan dari PPS Bitung tahun 2016-2020:

NO	NEGARA TUJUAN	TAHUN (TON)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Inggris	3.333,30	2.508,15	2.020,53	1.605,97	
2	Jerman	327,11	485,10	427,06	193,25	
3	Belgia		18,15			
4	Belanda	127,87	608,85	1.105,10	219,60	61.526,00
5	USA	1.733,62	553,42	1.692,78	1.633,33	101.609,56
6	Thailand	156,10	68,96	624,60	118,83	200,00
7	Switzerland	237,74	1.025,93	1.014,94	358,66	32.770,93
8	Spanyol	162,85	405,87	908,74	93,48	
9	Perancis	68,24	127,80	192,03	168,76	
10	Italia	19,60	63,20	46,40	35,05	
11	Yunani	17,745				
12	Korea Selatan		50,166			
13	Kroasia	16,871				
14	Philipina			81,55	50,00	
15	Jepang	99,62	180,06	99,92	42,25	10.691,00
16	Kanada				0,02	
17	Portugal	51,575		32,549		
18	Australia	257,08	586,63	281,43	838,37	28.093,09
19	Cyprus	8,00			16,01	
20	Malta				18,00	
21	Denmark				27,24	
22	Jordan				54,35	
JUMLAH		6.617,34	6.682,28	8.527,63	5.473,16	234.890,58

Berikut capaian hasil PNBP dari PPS Bitung tahun 2011-2020:

NO	TAHUN	PNBP		%
		TARGET	REALISASI	
1	2011	309.000.000	306.693.048.000	99.253
2	2012	309.000.000	331.637.854.000	107.326
3	2013	390.855.000	473.261.823.000	121.084
4	2014	490.000.000	661.376.728.000	134.975
5	2015	614.076.857	605.988.470.000	98.683
6	2016	740.874.352	907.043.962	122,429
7	2017	1.023.454.700	1.202.198.771	117,465
8	2018	1.313.898.400	1.033.120.716	78,630
9	2019	1.582.434.500	1.432.203.131	90,506
10	2020	1.128.804.501	1.130.871.868	100,183

Permasalahan dalam PPS Bitung, khususnya pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia, diantaranya perlu adanya peningkatan sarana prasarana usaha penangkapan ikan (infrastruktur pelabuhan perikanan), terbatasnya lahan, masih minimnya konektivitas sistem informasi, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien, kapasitas tambatan kapal nelayan yang terbatas, serta SDM dan yang perlu di-*upgrade*.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong PPS Bitung untuk mendapatkan peningkatan alokasi anggaran di tahun 2022 agar segala permasalahan yang ada dapat segera diatasi, seperti untuk kegiatan reklamasi atau pembebasan lahan pelabuhan, peningkatan sarana dan prasana infrastruktur, pendidikan dan pelatihan SDM bagi pegawai dalam rangka peningkatan jasa pelayanan dan nelayan dalam rangka adaptasi alih teknologi kapal.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI akan bersinergi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam menyerap aspirasi guna mencari jalan keluar serta merumuskan kebijakan terkait peningkatan produksi pangan nasional.
2. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian dalam hal ini Balai Penelitian Tanaman Palma dan Balai Karantina Pertanian Manado, baik berupa dukungan peningkatan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan sepanjang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama petani.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Badan Karantina Pertanian dalam hal ini Balai Karantina Pertanian Manado untuk melakukan sinergi penguatan perkarantinaaan di perbatasan, khususnya di Pelabuhan Bitung guna melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Komisi IV DPR RI meminta agar semua pihak bersinergi dan meningkatkan koordinasi dalam menjamin ketersediaan pasokan yang berkualitas dan stabilitas harga pangan pokok, sehingga pangan yang diterima masyarakat sebagai konsumen tersedia dengan cukup, terjangkau, aman, dan bergizi untuk dikonsumsi tanpa merugikan petani sebagai produsen.
5. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk mengantisipasi lonjakan pangan, mengingat dalam waktu dekat akan menghadapi bulan puasa dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan alokasi anggaran di PPS Bitung agar segala permasalahan yang ada dapat segera diatasi, seperti untuk kegiatan reklamasi tambatan kapal atau pembebasan lahan untuk perluasan pelabuhan kelautan perikanan, peningkatan sarana dan prasana infrastruktur, serta pendidikan dan pelatihan SDM bagi pegawai dalam rangka peningkatan jasa pelayanan dan nelayan dalam rangka adaptasi alih teknologi kapal, mengingat Kota Bitung merupakan wilayah penghasil perikanan yang telah membuktikan dapat meningkatkan PNBPN dan kesejahteraan nelayan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 April 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.
A-375

DOKUMENTASI

